

PERANAN DAN KEDUDUKAN KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN

Ahmad Saifudin, Marátus Sholihah, Sri Wahyuni¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

E-mail: ahmadsaifudin316@gmail.com, lika.sholikhah94@gmail.com,
sriwahyunik24@gmail.com.

Abstract

Curriculum management is a crucial part of the curriculum in every educational institution and school-based management. The scope of curriculum management includes: planning, organizing, implementing, and evaluating the curriculum. In the context of educational institutions, curriculum activities are more directed at efforts to align and adapt the national curriculum (competency standards and basic competencies) with local needs and the conditions of the school concerned. The goal is for the curriculum to support student development in relation to their environment, and there are several factors that need to be considered when managing the curriculum, the first is increasing productivity, the results of curriculum activities are an important aspect that must be considered in curriculum management. The main goal in management is to ensure that students can achieve learning outcomes in accordance with curriculum objectives. The principle of democracy, curriculum management needs to follow democratic rules, which provide a proper place for managers, implementers, and students, so that they can carry out their roles with responsibility to achieve curriculum objectives. Cooperation to achieve the desired results in curriculum management, all parties involved must work together well. Furthermore, the importance of effectiveness and efficiency. All processes in curriculum management must pay attention to effectiveness and efficiency in order to achieve curriculum objectives, so that management can provide satisfactory results with minimal cost, time, and effort. Supporting factors in the form of vision, mission, and objectives in the curriculum management process must be understood and implemented by all elements of the resources within the educational unit.

Keywords: *Role, Position of the Curriculum*

Abstrak

Pengelolaan kurikulum merupakan bagian yang sangat krusial dari kurikulum di setiap lembaga pendidikan serta manajemen yang berbasis pada sekolah. Lingkup pengelolaan kurikulum meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Dalam konteks lembaga pendidikan, kegiatan kurikulum lebih diarahkan pada upaya untuk menyelaraskan dan menyesuaikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dengan kebutuhan lokal serta kondisi sekolah yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar kurikulum dapat mendukung perkembangan siswa dalam hubungan dengan lingkungannya, dan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan saat melakukan pengelolaan kurikulum, yang pertama adalah peningkatan produktivitas, hasil dari aktivitas kurikulum merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kurikulum. Tujuan utama dalam manajemen adalah memastikan bahwa siswa dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan sasaran kurikulum. Prinsip demokrasi, Pengelolaan kurikulum perlu mengikuti kaidah demokratis, yang memberikan tempat yang layak bagi pengelola, pelaksana, dan siswa, sehingga mereka dapat melaksanakan peran mereka dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengelolaan kurikulum semua pihak yang terlibat harus bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, pentingnya efektivitas dan efisiensi. Semua proses dalam pengelolaan kurikulum harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi demi mencapai tujuan kurikulum, sehingga pengelolaan dapat memberikan hasil yang memuaskan dengan biaya, waktu, dan

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

tenaga yang minimal. Faktor pendukung berupa visi, misi, dan tujuan dalam proses pengelolaan kurikulum harus difahami dan mampu dilaksanakan oleh semua unsur Sumber daya yang ada di lingkungan satuan pendidikan.

Kata Kunci: *Peranan, Kedudukan Kurikulum*

Pendahuluan

Manajemen merupakan proses spesifik yang meliputi langkah-langkah seperti merencanakan, mengatur, menggerakkan, dan mengendalikan. Tindakan ini dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Peran manajemen sangat penting karena berhubungan, memengaruhi, dan bahkan mencakup hampir semua bagian dari kehidupan manusia. Kurikulum, dari segi etimologi, berasal dari kata Yunani, yaitu *curir* yang berarti "pelari" dan *curere* yang diterjemahkan sebagai "tempat berpacu". Pada masa Romawi kuno, istilah kurikulum menggambarkan jarak yang harus dilalui pelari dari titik awal hingga garis akhir. Penggunaan istilah kurikulum dalam konteks pendidikan baru dimulai pada tahun 1855. Saat itu, kurikulum merujuk pada sejumlah mata pelajaran di perguruan tinggi. Ini adalah sekumpulan pelajaran yang perlu dipelajari oleh siswa di sekolah atau perguruan tinggi untuk mendapatkan ijazah tertentu.²

R. Ibrahim membagi kurikulum menjadi tiga bagian, yaitu kurikulum sebagai isi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai area studi. Pada bagian pertama, kurikulum dilihat sebagai rencana untuk kegiatan belajar siswa di sekolah, atau sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, kurikulum dapat merujuk pada sebuah dokumen yang mencakup rumusan tujuan, materi ajar, aktivitas belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Kurikulum juga bisa digambarkan sebagai dokumen resmi yang merupakan hasil kesepakatan antara pembuat kurikulum serta pemangku kebijakan pendidikan dan masyarakat.³

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berkembang sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁴

Pengelolaan kurikulum merupakan sebuah sistem yang bersifat kolaboratif, menyeluruh, terstruktur, dan sistematis untuk mencapai tujuan kurikulum. Implementasi manajemen kurikulum harus berkembang sejalan dengan konteks manajemen yang berfokus pada sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan satuan pendidikan. Jadi, otonomi yang diberikan kepada institusi pendidikan atau sekolah untuk mengelola kurikulum, dengan mengutamakan

² Vina Putri Rahayu dan Hery Noer Aly, "Evaluasi Kurikulum," *Journal on Education*, 05.03 (2023), hal. 5692–99.

³ Syafaruddin dan Makmur Syukri, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022, IV.

⁴ Wiji Hidayati, S Syaefudin, dan Umi Muslimah, *Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan*, Semesta Aksara, 2021.

kebutuhan dan pencapaian target dalam visi dan misi institusi pendidikan atau sekolah, tetap harus memperhatikan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui undang-undang.⁵

Pengelolaan kurikulum merupakan sebuah sistem yang bersifat kolaboratif, menyeluruh, terstruktur, dan sistematis untuk mencapai tujuan kurikulum. Implementasi manajemen kurikulum harus berkembang sejalan dengan konteks manajemen yang berfokus pada sekolah dan kurikulum yang sesuai dengan satuan pendidikan. Jadi, otonomi yang diberikan kepada institusi pendidikan atau sekolah untuk mengelola kurikulum, dengan mengutamakan kebutuhan dan pencapaian target dalam visi dan misi institusi pendidikan atau sekolah, tetap harus memperhatikan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui undang-undang.⁶

Peran kreatif; menekankan pentingnya kurikulum yang mampu menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan kemajuan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat saat ini serta di masa yang akan datang, agar pendidikan tidak ketinggalan. Ini berarti bahwa apa yang diajarkan di madrasah pada akhirnya harus bermakna dan sesuai dengan kebutuhan serta tuntunan sosial masyarakat. Peran kritis dan evaluatif; adalah peran dimana kurikulum tidak hanya menurunkan budaya dari masa lalu, tetapi juga harus disesuaikan dengan keadaan saat ini dengan cara yang selektif. Kurikulum berfungsi untuk mengevaluasi dan memilih nilai-nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan dan juga aktif dalam mengontrol serta menyaring sosial.⁷

Sesuai dengan fungsi yang "dijalankan" oleh kurikulum, maka kurikulum yang dibuat harus sesuai, seimbang, dan harmonis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selaras dengan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, Nazhary menyatakan bahwa: 1) kurikulum memiliki peran sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat dan lembaga tertentu untuk mencapai tujuan; 2) kurikulum berfungsi sebagai materi dalam program pendidikan, seperti bahan ajar, yang diimplementasikan dalam periode tertentu seperti periode empat bulan, semester, kelas, atau tingkat tertentu; 3) kurikulum adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Membahas pendidikan artinya juga berbicara tentang masa yang akan datang. Masa depan suatu negara ditentukan oleh kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan saat ini, sebab kurikulum adalah sarana untuk mencapai cita-cita dan masa depan bangsa melalui pendidikan. Karena itu, sebagai sarana penting untuk mencapai tujuan, kurikulum perlu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, kemajuan ilmu, dan kemajuan teknologi.⁸

Pembahasan

1. Peranan dan Kedudukan Kurikulum Pendidikan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kurikulum adalah sekumpulan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, dan metode yang digunakan sebagai pedoman

⁵ Dosen Syariah dan Dan Ekonomi Islam, *ANALISIS SWOT DALAM PeNgemBANgAN BISNIS (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus) Istiqomah dan Irsad Andriyanto*, *BISNIS*, 2017, v.

⁶ Eri Samsidar dan Ahmad Nazir, *RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM*, 2021, i.

⁷ dkk Idamatul Khoiriyah, *Manajemen Mutu Madrasah Meningkatkan Daya Saing di Era Kompetitif*, 2016.

⁸ Muchammad Iqbal Chailani, "Pendidikan Dan Relevansinya Dengan," *MANAZHIM Jurnanal Menejeman dan Pendidikan*, 1 (2019), hal. 45–60.

untuk melaksanakan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki peran dan fungsi yang berkaitan dengan komponen-komponen yang mendukung tujuan pendidikan, menjadikannya salah satu elemen dalam pendidikan. Hamalik dalam Sanjaya menyebutkan bahwa kurikulum memiliki tiga peran, yaitu: peran konservatif, peran kreatif, serta peran kritis dan evaluatif.⁹

- a. Pandangan konservatif; menekankan bahwa kurikulum perlu menjaga nilai-nilai budaya yang berasal dari masa lalu yang masih dianggap penting untuk saat ini, terutama di tengah globalisasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan masuknya pengaruh budaya luar yang dapat mengancam budaya lokal. Dengan pendekatan konservatif, kurikulum berfungsi untuk melindungi dari berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai mulia dalam masyarakat, sehingga mampu membentuk dan mempengaruhi perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di sekitarnya..
- b. Peran kreatif; menegaskan bahwa kurikulum perlu mampu menciptakan hal-hal baru yang sejalan dengan perkembangan yang ada dan kebutuhan masyarakat baik saat ini maupun di masa depan agar pendidikan tetap up-to-date. Artinya, apa yang dipelajari di madrasah nantinya akan memiliki makna dan relevansi dengan kebutuhan serta tuntutan sosial dari masyarakat.
- c. Peran kreatif menunjukkan bahwa kurikulum harus dapat menghasilkan inovasi yang sesuai dengan perkembangan terbaru dan kebutuhan masyarakat, baik sekarang maupun di masa depan, agar pendidikan tetap relevan. Ini berarti bahwa materi yang diajarkan di madrasah harus dapat dipahami dan mempunyai hubungan dengan kebutuhan serta tuntutan yang ada dalam masyarakat.
- d. Sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh kurikulum, kurikulum yang dirancang harus konsisten, seimbang, dan selaras dalam mencapai hasil yang diinginkan. Sejalan dengan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, Nazhary menyatakan bahwa: 1) kurikulum berperan sebagai pedoman untuk melaksanakan pendidikan di tingkat tertentu dan lembaga pendidikan tertentu demi mencapai tujuan; 2) kurikulum berfungsi sebagai materi dari program pendidikan, seperti bahan ajar, yang dilaksanakan dalam periode tertentu seperti triwulan, semester, kelas, atau tingkat tertentu; 3) kurikulum berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
- e. Membahas pendidikan sebenarnya berarti membicarakan tentang masa yang akan datang. Rencana untuk masa depan sebuah negara dibuat melalui kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan sekarang, karena kurikulum adalah sarana untuk mencapai tujuan serta masa depan bangsa melalui pendidikan. Sebagai sarana yang sangat penting, kurikulum perlu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi yang canggih.

⁹ Syahril Chaniago, *Manajemen Mutu Pendidikan, Econosains Jurnal Online Ekonomi dan Pendidikan*, 2010, VIII, doi:10.21009/econosains.0082.08.

Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam lembaga pendidikan, terutama di sekolah. Nana Syaodih mengatakan bahwa kurikulum adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk pendidikan di sekolah. Kurikulum tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar di sekolah. Tanpa adanya kurikulum yang jelas, kegiatan pendidikan dan pembelajaran akan menjadi tidak teratur dan tanpa arah. Kurikulum memiliki posisi yang utama dalam seluruh proses pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman atau arahan dalam proses belajar mengajar. Kurikulum mengarahkan semua aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ini adalah rencana pendidikan yang memberikan panduan mengenai jenis, jangkauan, urutan isi, dan proses pendidikan. Kurikulum juga merupakan disiplin yang diakui oleh para ahli kurikulum, yang menyediakan konsep-konsep atau dasar-dasar teoretis untuk pengembangan kurikulum di institusi pendidikan.¹⁰

Kurikulum merupakan hal yang sangat penting di sekolah. Apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki kurikulum? Kurikulum memiliki peran utama dalam proses belajar mengajar, dan tanpa kurikulum, tujuan pendidikan tidak dapat dicapai dengan baik. Ini karena kurikulum mengandung rencana pendidikan yang berfungsi sebagai panduan, serta sebagai area studi yang menawarkan konsep dan dasar bagi lembaga pendidikan.

2. Susunan kebijakan pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia dapat dilihat melalui sejumlah peraturan berikut: Di antara tahun 2004 hingga 2009, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada ekonomi, sejalan dengan rencana strategis pendidikan nasional untuk periode 2005 hingga 2009. Hal ini merujuk pada mandat UUD 1945 dan amandemen keempat pasal 31 yang membahas pendidikan; Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 berisi Visi Indonesia di masa depan; Undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang membahas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah; UU No. 33 Tahun 2004 terkait dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU No. 14 Tahun 2005 yang berkaitan dengan Guru dan Dosen; PP No. 20 Tahun 2004 mengenai Rencana Kerja Pemerintah; PP No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; dan PP No. 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan.¹¹

3. Kebijakan dan pelaksanaan kurikulum di Indonesia

Kebijakan sering kali dianggap sama dengan kata-kata seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. Kebijakan suatu negara. Kebijakan nasional adalah suatu ide yang diterapkan dalam suatu negara. Seperti yang dijelaskan oleh W. I. Jenkins (1978), definisi awal tentang kebijakan nasional adalah sekumpulan keputusan yang saling terkait satu sama lainnya. Keputusan ini diambil oleh aktor politik atau sekelompok

¹⁰ Tatang Ibrahim dan Ahmad Rusdiana, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, 2021.

¹¹ Arif Wicaksana dan Tahar Rachman, "Pengembangan Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) di Sekolah," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 3.1 (2018), hal. 10-27 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

politisi yang berkaitan dengan pemilihan tujuan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dalam kondisi tertentu. Pada dasarnya, keputusan ini berada dalam kewenangan para politisi tersebut. Pengertian kedua dari kebijakan negara merujuk pada serangkaian pilihan yang diambil untuk mengatasi beberapa masalah atau kelompok masalah yang saling berhubungan, di mana semua isu tersebut berdampak pada masyarakat luas.

Kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan mengenai penilaian dilakukan berdasarkan sistem nilai dan faktor-faktor yang diperlukan dalam situasi tertentu. Hal ini diwakili oleh lembaga sebagai rencana umum yang berfungsi sebagai petunjuk untuk membantu proses pengambilan keputusan, sehingga sasaran pendidikan yang diinginkan dapat tercapai.

Satu hal menarik lainnya bisa ditemukan dalam konstitusi Jepang, yaitu undang-undang pendidikan yang dibuat pada tahun 1947. Berikut adalah inti dari undang-undang tersebut: 1) prinsip hukum yang jelas; 2) prinsip administrasi yang bersifat demokratis; 3) prinsip tidak memihak; 4) prinsip penyesuaian dan penetapan keadaan pendidikan; 5) prinsip pembagian kewenangan.

Prinsip yang pertama menjelaskan bahwa undang-undang dan peraturan mengatur pengelolaan. Sebelum Perang Dunia II, keputusan terkait pendidikan ditentukan oleh peraturan kekaisaran, sementara pandangan parlemen dan masyarakat sering diabaikan. Namun, setelah reformasi, pada masa pasca perang, jalannya pendidikan dikendalikan oleh undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh parlemen. Prinsip kedua menunjukkan bahwa sistem administrasi pendidikan perlu dibangun berdasarkan kesepakatan nasional dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam langkah-langkah pembuatan kebijakan pendidikan. Prinsip ketiga memastikan bahwa kekuasaan dalam pendidikan harus bersifat mandiri, tanpa pengaruh atau intervensi dari kekuatan politik.¹²

Prinsip keempat mengindikasikan bahwa pemegang kewenangan pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang cukup untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip kelima menyatakan bahwa pendidikan harus dikelola berdasarkan otonomi pemerintah lokal karena pendidikan merupakan fungsi dari pemerintah lokal.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, ada konsep baru yang berupa kurikulum yang berfokus pada kompetensi. Dengan demikian, kurikulum 2013 ditujukan untuk mencapai kompetensi dan pelaksanaannya tetap berorientasi pada delapan standar pendidikan nasional.

Pelaksanaan kurikulum menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten atau kota. Tanggung jawab dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dibagi sebagai berikut: 1) pemerintah pusat memiliki tugas untuk menyiapkan guru serta kepala sekolah agar dapat melaksanakan kurikulum; 2) pemerintah pusat juga bertugas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum di tingkat nasional; 3) pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum di provinsi masing-masing; 4) pemerintah kabupaten atau kota bertugas untuk memberikan dukungan

¹² Dale H. Besterfield, *Quality improvement management, SME Technical Paper (Series) MM*, 1989.

profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam menjalankan kurikulum di wilayah mereka.

Perubahan dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 sebenarnya tidak jauh berbeda. Pelaksanaan kurikulum 2013 hampir sama dengan KTSP, yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) berfokus pada siswa; 2) mendorong kreativitas siswa; 3) menciptakan suasana yang menyenangkan dan menantang; 4) mengandung nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika; serta 5) memberikan berbagai pengalaman belajar melalui penggunaan berbagai strategi dan metode yang menarik, relevan, efektif, efisien, dan bermakna.

Proses belajar dalam kurikulum 2013 untuk semua level dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan ilmiah. Dalam langkah-langkah pendekatan ilmiah, terdapat berbagai aktivitas seperti mengumpulkan informasi melalui observasi, mengajukan pertanyaan, melakukan eksperimen, lalu mengolah data atau informasi tersebut, menyajikannya, dan diikuti dengan analisis, penalaran, kemudian menarik kesimpulan, serta menciptakan. Untuk beberapa mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, mungkin saja pendekatan ilmiah ini tidak selalu dapat diterapkan secara langsung. Dalam kondisi seperti ini, penting agar proses pembelajaran tetap menerapkan nilai-nilai ilmiah dan menjauhi nilai-nilai yang tidak berdasar ilmiah.¹³

4. Karakteristik manajemen kurikulum

Karakteristik manajemen kurikulum dapat dilihat dari aspek yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum di sekolah atau madrasah. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Di bawah ini, karakteristik manajemen kurikulum akan dijelaskan: Karakteristik perencanaan kurikulum:

Ciri-ciri dari perencanaan kurikulum mencakup pemahaman tentang apa itu perencanaan kurikulum, fungsi yang dimilikinya, model yang digunakan, serta desain kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah sekumpulan rencana belajar yang bertujuan untuk membantu peserta didik berperilaku lebih baik, serta menilai perubahan yang terjadi pada mereka. Para pemimpin perlu membuat perencanaan dengan sangat hati-hati, teliti, menyeluruh, dan detail, karena perencanaan ini memiliki berbagai fungsi, seperti: a) berfungsi sebagai pedoman atau alat dalam manajemen, yang memuat informasi tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media pengajaran, tindakan yang harus diambil, sumber biaya, tenaga pengajar, fasilitas yang dibutuhkan, sistem pengendalian dan evaluasi, serta peran elemen-elemen ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi; b) menjadi penggerak bagi organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perencanaan kurikulum yang baik sangat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan, sehingga perlu memuat informasi kebijakan yang relevan, selain keterampilan kepemimpinan dan pengetahuan yang sudah dimiliki; c) sebagai pendorong untuk melaksanakan sistem pendidikan agar mencapai hasil yang optimal.¹⁴

Dan beberapa jenis model perencanaan yang dapat dibahas. Pertama, terdapat model

¹³ Subakri dan Anas Ma'ruf Annizar, *Budaya Mutu Kepemimpinan Pendidikan*, IAIN Jember Press, 2021.

¹⁴ Nuri Aslami, "Sistem Manajemen Mutu," *Sistem Manajemen Mutu - Persyaratan*, 2020, hal. 1-76 <[http://repository.uinsu.ac.id/9535/1/Diktat Sistem Manajemen Mutu.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/9535/1/Diktat%20Sistem%20Manajemen%20Mutu.pdf)>.

perencanaan yang bersifat rasional deduktif atau dikenal juga sebagai rasional tyler. Model ini fokus pada penggunaan logika dalam pengembangan program kurikulum dan dimulai dari penetapan tujuan yang jelas. Namun, model ini sering kali mengabaikan tantangan yang ada di lingkungan kerja. Model ini dapat digunakan dalam berbagai tingkat pengambilan keputusan, seperti dalam pengelolaan proyek pengembangan guru atau penentuan kebijakan perencanaan berbasis tujuan di dalam departemen. Model ini sangat sesuai untuk sistem perencanaan pendidikan yang bersifat pusat, yang menekankan pada perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pusat, di mana kurikulum dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan di bidang sosial ekonomi.

Kedua, model interaktif rasional melihat rasionalitas sebagai kebutuhan untuk mencapai kesepakatan antara berbagai pendapat yang tidak selalu mengikuti urutan logis. Dalam hal ini, perencanaan kurikulum dipahami lebih sebagai “perencanaan dengan” ketimbang “perencanaan bagi”. Model ini sering disebut model situasional, di mana asumsi rasionalitasnya menekankan pada respons yang fleksibel dalam kurikulum yang mungkin tidak memuaskan serta inisiatif di tingkat sekolah atau lokal. Hal ini bisa mencerminkan keyakinan ideologis dalam masyarakat demokratis atau dalam kurikulum yang berbasis di sekolah. Pelaksanaan rencana menjadi langkah penting dalam pengembangan kurikulum, di mana diperlukan adaptasi antara perencana dan pengguna kurikulum.¹⁵

Ketiga, model disiplin, dalam perencanaan ini sangat menekankan pada para guru. Mereka yang akan merancang kurikulum dengan mempertimbangkan secara sistematis mengenai relevansi pengetahuan filosofis, isu-isu pengetahuan yang bermakna, argumen-argumen kecenderungan sosial dari sosiologi, dan psikologi yang memberikan informasi tentang urutan materi pelajaran.

Keempat, model yang tidak melakukan perencanaan adalah sebuah jenis model yang bergantung pada intuisi para guru di dalam kelas untuk mengambil keputusan. Model ini memerlukan usaha yang minimal, hanya sebatas merumuskan tujuan tertentu, menyampaikan pendapat secara formal, dan melakukan analisis secara intelektual.¹⁶

Penutup

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah peranan dan kedudukan kurikulum lebih diarahkan pada upaya untuk menyelaraskan dan menyesuaikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dengan kebutuhan lokal serta kondisi sekolah yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar kurikulum dapat mendukung perkembangan siswa dalam hubungan dengan lingkungannya, dan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan saat melakukan pengelolaan kurikulum, yang pertama adalah peningkatan produktivitas, hasil dari aktivitas kurikulum merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kurikulum.

¹⁵ Abd. Muhith, “Dasar-Dasar Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2017), hal. 1–152.

¹⁶ M.N. Nasution, “Nasution, M.N. (2021). Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). Jakarta: Ghalia Indonesia,” *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, 2021.

Tujuan utama dalam manajemen adalah memastikan bahwa siswa dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan sasaran kurikulum. Prinsip demokrasi, Pengelolaan kurikulum perlu mengikuti kaidah demokratis, yang memberikan tempat yang layak bagi pengelola, pelaksana, dan siswa, sehingga mereka dapat melaksanakan peran mereka dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengelolaan kurikulum semua pihak yang terlibat harus bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, pentingnya efektivitas dan efisiensi. Semua proses dalam pengelolaan kurikulum harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi demi mencapai tujuan kurikulum, sehingga pengelolaan dapat memberikan hasil yang memuaskan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang minimal. Faktor pendukung berupa visi, misi, dan tujuan dalam proses pengelolaan kurikulum harus difahami dan mampu dilaksanakan oleh semua unsur Sumber daya yang ada di lingkungan satuan pendidikan.

Daftar pustaka

- Aslami, Nuri. "Sistem Manajemen Mutu," *Sistem Manajemen Mutu - Persyaratan*, 2020.
- Besterfield, Dale H. *Quality improvement management, SME Technical Paper (Series) MM*, 1989.
- Chaniago, Syahril. *Manajemen Mutu Pendidikan, Econosains Jurnal Online Ekonomi dan Pendidikan*, 2010.
- Dosen Syariah dan Dan Ekonomi Islam. *ANALISIS SWOT DALAM PeNgemBANgAN BISNIS (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus) Istiqomah dan Irsad Andriyanto, BISNIS*, 2017.
- Hidayati Wiji, S Syaefudin, dan Umi Muslimah. *Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan, (Semesta Aksara: 2021)*.
- Ibrahim, Tatang dan Ahmad Rusdiana. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, 2021.
- Iqbal Chailani, Muchammad. "Pendidikan Dan Relevansinya Dengan," *MANAZHIM Jurnanal Menejeman dan Pendidikan*, 1 (2019).
- Khoiriyah, Idamatul, dkk. *Manajemen Mutu Madrasah Meningkatkan Daya Saing di Era Kompetitif*, 2016.
- M.N. Nasution, "Nasution, M.N. (2021). Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). Jakarta: Ghalia Indonesia," *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, 2021.
- Muhith, Abd. "Dasar-Dasar Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2017).
- Putri Rahayu, Vina dan Hery.Noer Aly. "Evaluasi Kurikulum," *Journal on Education*, (Maret 2023).

Samsidar, Eri dan Ahmad Nazir. *RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM*, 2021.

Subakri dan Anas Ma'ruf Annizar, *Budaya Mutu Kepemimpinan Pendidikan*, IAIN Jember Press, 2021.

Syafaruddin dan Syukri, Makmur. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, (Pusdikra Mitra Jaya, 2022).

Wicaksana, Arif dan Tahar Rachman. "Pengembangan Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) di Sekolah," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018).